



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 18 April 2017

Halaman: 1

Repotnya Punya Bangunan Cagar Budaya

Bangunan Kuno Dihargai Murah Tanpa Melihat Sejarah

JOGJA - Merawat bangunan cagar budaya (BCB) memang bukan pekerjaan yang mudah dan murah. Apalagi, minim dukungan dari pemerintah untuk perawatan maupun pemeliharaan. Selain hanya pengurangan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB). Bahkan, rencana pembelian BCB milik

perseorangan oleh pemerintah dinilai sangat rendah penawarannya. "Bangunan yang ditetapkan BCB oleh pemerintah tidak *cucuk* dengan perhatian pemerintah," ketus Hasan Widagdo, pemilik Ndalem Ropingen di Kotagede, kemarin (17/4). Dikatakan, Ndalem Ropingen pernah ditawarkan oleh Pemkot Jogja senilai Rp 8 miliar pada 2015. Keluarga besar Hasan tegas menolaknya. ▶ Baca Repotnya... Hal 7

Sisihkan APBD untuk Biaya Perawatan BCB

■ REPOTNYA...

Sambungan dari hal 1

Hal itu didasarkan pada keterawatan dan nilai historis kondisi bangunan yang terletak di Kelurahan Purbayan itu. "Taksiran harga tim *appraisal* tak masuk akal," sindirnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja itu mencontohkan, taksiran harga untuk pendopo yang masih asli hanya Rp 130 juta. "Sekarang kalau mau buat joglo dengan kualitas kayu yang baik apa cukup segitu," lanjutnya setengah bertanya.

Menurut Hasan, tim *appraisal* seharusnya menentukan harga sebuah BCB juga mempertimbangkan nilai historisnya. Bukan seperti bangunan pada umumnya. "Itu *kan* seperti mau beli keris tapi hanya menghargai besinya," ujar Hasan kembali melontarkan sindiran.

Sebagaimana diketahui, Ndalem Ropingen ditetapkan sebagai BCB oleh Pemkot Jogja pada 2009. Ndalem Ropingen merupakan jenis rumah Jawa lengkap seluas sekitar 800 meter persegi. Di dalamnya terdapat beberapa bangunan, seperti pen-

dopo model joglo dan *gandok* atau bangunan yang berada di sebelah kiri dan kanan pendopo. Secara historis, Ndalem Ropingen juga pernah disinggahi Bung Karno. Mengenai tahun pendiriannya, Hasan mengaku tidak hafal. Dia memperkirakan sekitar tahun 1800-an. "Saat peluncuran Jogja Kota Batik dunia oleh Gubernur DIJ juga di Ndalem Ropingen," ucapnya.

Sesuai regulasi, setelah ditetapkan sebagai BCB, bangunan ini rumah keluarga besar Hasan itu tak boleh diubah. "Sebagai pemilik *kan* jadi *aras-arasen*. Mau direnovasi tidak bisa, apalagi diperjualbelikan," keluhnya.

Menurut Hasan, pemerintah seharusnya juga membiayai perawatan atau pemugaran BCB. Supaya beban pemilik BCB lebih ringan. Diakui, Ndalem Ropingen sendiri pada 2012 lalu pernah mendapatkan bantuan perawatan dari Dinas Kebudayaan DIJ lewat dana keistimewaan Rp 96 juta. Hasan berharap bantuan serupa bisa dialokasikan untuk BCB lain.

Hasan berharap, sebelum sebuah bangunan ditetapkan sebagai BCB alangkah baiknya

pemerintah menjelaskan hak dan kewajiban bagi pemilik. Termasuk soal renovasi dan jual beli bangunan. "Jadi pemilik tahu risikonya," ungkapnya.

Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya) Johannes Marbun mengatakan, pemerintah seharusnya menyisihkan anggaran untuk biaya perawatan bangunan yang akan ditetapkan sebagai BCB. Itu sebagai bentuk perhatian pemkot dalam upaya pelestarian warisan budaya. Kendati demikian, anggaran pelestarian dari pemerintah, lanjut Marbun, tidak bisa dipukul rata. Tapi dikhususkan bagi pemilik BCB kurang mampu.

Marbun juga mengajak kalangan swasta ikut serta dalam pelestarian BCB di Kota Jogja. Terlebih saat ini beberapa BCB dimanfaatkan sebagai perkantoran. Hal itu juga menjadi tantangan tersendiri supaya tidak mengubah arsitektur bangunan dan menghilangkan sejarahnya. Untuk itu Marbun meminta setiap renovasi BCB harus ada asistensi dari pemerintah daerah. "Supaya jika ada pemugaran tidak mengubah bentuk asli BCB," ungkapnya. (pra/yog/ga)

3.

Positif

Segera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005